



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN DALAM MERESPON ISU
PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
(PERIODE 1997-2007)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si) dalam Ilmu Hubungan Internasional

Oleh
Hari Poerna Setiawan
0606019390

JAKARTA
2008

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA

Hari Poerna Setiawan. 0606019390
KEBIJAKAN LUAR NEGERI JERMAN
DALAM MERESPON ISU PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
(PERIODE 1997-2007)

xiv halaman bagian awal, 117 halaman bagian isi, 5 tabel, 1 gambar, 16 buku (1981-2008), 1 jurnal dan penelitian, 26 situs internet, 3 laporan.



ABSTRAK

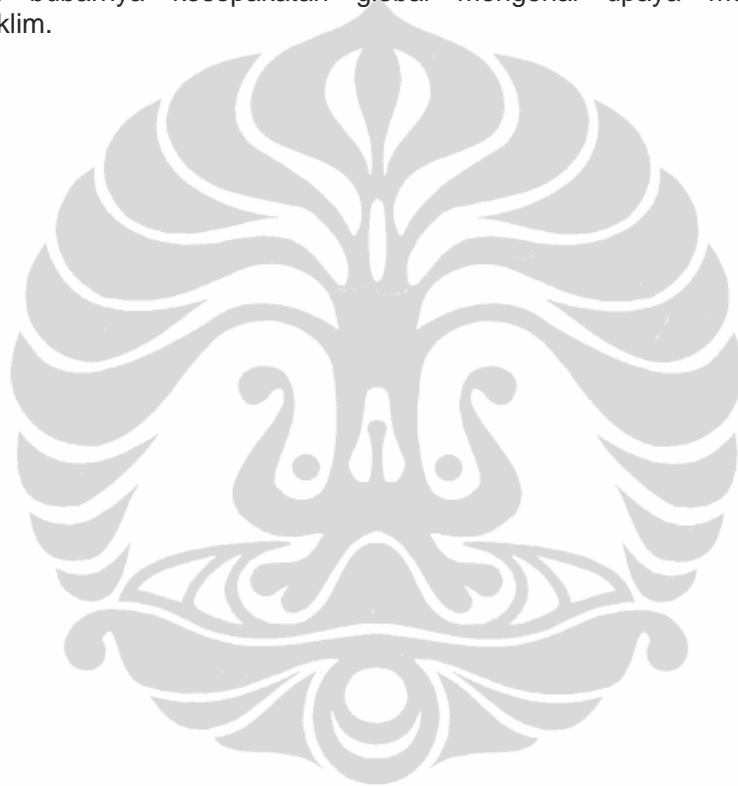
Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negara-negara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju mengimbau agar negara berkembang ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat.

Awal tahun 1990-an PBB menyepakati pembentukan UNFCCC sebagai wadah bagi pelaksanaan perundingan untuk menyusun mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Protokol Kyoto yang disusun sebagai mekanisme mengikat (*legally binding*) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca tidak dapat berjalan efektif karena pertentangan kepentingan negara maju dan negara berkembang terkait dengan kepentingan ekonomi.

Diantara negara maju, Jerman merespon isu perubahan iklim dengan kebijakan-kebijakan yang aktif dan progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa menunjukkan komitmennya dalam mengusulkan dan memelopori tindakan-tindakan konkret dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto. Kebijakan luar negeri Jerman yang progresif dalam menangani isu perubahan iklim lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik domestik.

Sebagai negara demokrasi liberal, pemerintah federal Jerman berperan untuk mengelola dinamika politik domestik untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

Perundingan internasional dalam kerangka UNFCCC yang berlangsung setiap tahun pada kenyataannya telah menjadi wahana pertarungan kepentingan ekonomi dan politik negara-negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Ditengah kondisi tersebut, kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim dari kebuntuan-kebuntuan yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.



UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS STUDY
POST GRADUATE PROGRAM

Hari Poerna Setiawan. 0606019390
*GERMAN FOREIGN POLICY IN RESPONDING TO GLOBAL CLIMATE
CHANGE ISSUES*
(PERIOD 1997-2007)

xiv cover pages, 117 pages of content, 5 tables, 1 charts, 16 books (1981-2008),
1 journal and research, 26 internet sites, 3 reports



ABSTRACT

Climate change has increasingly threatened the life of people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem can not be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world.. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economic interests among them. In this issue, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries.

In early 1990s, the United Nations has approved the establishment of UNFCCC, forum under United Nations, as a tools for negotiation in order to arrange the mechanisms for the prevention and dealing with climate change issue. Kyoto Protocol is one of binding mechanism in order to reduce greenhouse gas emissions. However, it is not be effective because of conflict in economic interest between developed and developing countries.

Among developed countries, Germany has strong political leadership in responding to global climate change. German is also very active and progressive in developing its climate change policies. Germany with the EU always shows its strong commitment in recommending and pioneering actions in order to reduce emissions even more than as required in the Kyoto Protocol. German foreign policy in dealing with climate change is more influenced by domestic political conditions. As a liberal democratic country, the federal government has central

role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change.

International negotiation in the UNFCCC framework conducts every year. Nevertheless, this negotiation forum is used to fight the economic and political interests between developed and developing countries. In this condition, German foreign policy often comes up with progressive policy that avoids the impasse of global agreement efforts in combat climate change.





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya pribadi penulis, di bawah bimbingan Dra. Nurul Isnaeni, MA. Karya tulis ini sudah mengikuti ketentuan penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penjiplakan, maka saya sanggup menerima sanksi.

Jakarta, 24 September 2008

Hari Poerna Setiawan
NPM. 0606019390

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : **Hari Poerna Setiawan**
NPM : **0606019390**
Judul : **Kebijakan Luar Negeri Jerman
Dalam Merespon Isu Perubahan Iklim Global
(Periode 1997-2007)**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Tesis Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada hari Rabu, 24 September 2008 dan dinyatakan lulus.

TIM PENGUJI

Pembimbing Tesis :
Dra. Nurul Isnaeni, MA

Penguji Ahli :
Drs. Ananta B. Gondomono, MA

Ketua Sidang :
Dr. Hariyadi Wirawan

Sekretaris Sidang :
Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si.

KATA PENGANTAR

Isu perubahan iklim kian mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Tanpa sadar kita ikut memberikan kontribusi atas keadaan yang terjadi sekarang. Sebagai bentuk empati pada kondisi yang berlangsung sekarang, tesis ini mengulas mengenai kebijakan luar negeri Jerman dalam merespon isu perubahan iklim global. Kebijakan negara maju terhadap perubahan iklim sangat mempengaruhi dinamika politik internasional yang pada gilirannya berdampak bagi negara berkembang termasuk Indonesia.

Ranah diplomasi internasional tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer dan senjata dengan mengemukakan isu ekonomi dan lingkungan sebagai isu penting dalam hubungan antar negara-negara. Isu perubahan iklim merupakan persoalan bersama umat manusia karena tidak mungkin ditangani oleh satu negara atau sekelompok negara saja. Negara-negara harus bekerja sama untuk mencegah dan mengantisipasi perubahan iklim agar dapat dikurangi dampaknya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu dinamika politik perubahan iklim yang telah dan sedang berlangsung perlu mendapat perhatian mengingat peranannya yang besar dalam menentukan arah pencegahan ancaman perubahan iklim di masa mendatang. Utamanya adalah mencermati relasi antar negara, baik sesama negara maju maupun antara negara maju dan negara berkembang.

Pertama kali, penulis mengucapkan syukur kepada Allah *subhanallohu wa ta'ala* atas semua berkahnya hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Nurul Isnaeni, MA selaku pembimbing yang telah menyediakan banyak waktunya untuk membagi ilmunya kepada penulis, kepada Zainuddin Djafar Ph.D selaku Ketua Program Pasca Sarjana Hubungan Internasional, kepada Dr. Hariyadi Wirawan selaku ketua sidang dan ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, kepada Drs. Ananta B. Gondomono, MA sebagai penguji ahli dan kepada Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si. selaku sekretaris sidang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia; kepada seluruh staf sekretariat program Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas

Indonesia; dan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa atas dinamikanya selama mengikuti program ini.

Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada keluarga tercinta khususnya istri dan anak-anak atas “kehilangan” sekian banyak waktunya dalam penyelesaian tesis ini. Akhirnya penulis mempersembahkan tesis ini kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta atas semua bentuk dukungannya yang telah diberikan selama ini.

Jakarta, 24 September 2008
Hari Poerna Setiawan



DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas	vi
Lembar Pengesahan Tesis	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel dan Gambar	xii
Daftar Singkatan	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Teori	14
G. Operasionalisasi Konsep	17
H. Asumsi dan Hipotesis	17
I. Model Analisis	18
J. Metode Penelitian	19
K. Sistematika Penulisan	20
BAB II Politik Perubahan Iklim Jerman: Refleksi Kondisi Domestik	
A. Sistem Politik Jerman	21
B. Partai Hijau sebagai Kekuatan Politik Baru	24
B.1. Partai Hijau di Parlemen Jerman	24
B.2. Dinamika Politik Perubahan Iklim Jerman dan Peran Partai Hijau	29
C. Peranan Pemerintah Federal Jerman	34
C.1. Peranan Pemerintah Federal Menginisiasi Politik Perubahan Iklim	34

	C.2.	Kebijakan Pemerintah Federal Jerman dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global	38
	C.3.	Peluang Ekonomi Jerman menghadapi Politik Perubahan Iklim Global	40
	D.	Peranan NGO dalam Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Federal	42
BAB	III	Dinamika Politik Perubahan Iklim Global dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Jerman	
	A.	<i>United Nations Framework Conference on Climate Change</i> (UNFCCC)	47
	B.	Protokol Kyoto	53
	B.1.	<i>Berlin Mandate</i>	54
	B.2.	Protokol Kyoto: Langkah Besar Ke Depan	63
	B.3.	Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jerman	72
	B.4.	Dinamika Internal Uni Eropa dalam Merespon Protokol Kyoto	81
	C.	Perjalanan Konvensi Perubahan Iklim dan Peranan Jerman	
	C.1.	Dari Kyoto Menuju Marrakesh	86
	C.2.	Makna Strategis COP-8 bagi Kelanjutan Protokol Kyoto	90
	C.3.	COP-13 dan Komitmen Jerman	98
BAB	IV	Kebijakan Luar Negeri Jerman Mendinamisasi Politik Perubahan Iklim Global	
	A.	Peranan Partai Hijau Mendorong Kepemimpinan Jerman dalam Dinamika Politik Perubahan Iklim Global	101
	B.	Kepemimpinan Jerman di Uni Eropa dan G-8: Progresifitas Kebijakan Luar Negeri Jerman Merespon Isu Perubahan Iklim	108
BAB	V	Kesimpulan	113
		Daftar Pustaka	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel III.1. Periodisasi dan Capaian Perundingan <i>Ad-Hoc Working Group on Berlin Mandate</i> (AGBM).	63
Tabel III.2. Komitmen Pembatasan dan Pengurangan Jumlah Emisi menurut Protokol Kyoto	74
Tabel III.3. Target Pengurangan Emisi dalam EU Burden Sharing Agreement dan Amerika Serikat periode 2008 – 2012	82
Tabel III.4. Tren Perubahan Emisi Gas Rumah Kaca negara Uni Eropa dan Amerika Serikat 1990-2000	84
Tabel IV.1. Pelaksanaan <i>Conference of the Parties</i> (COP) dan Capaian yang dihasilkan	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Emisi CO ₂ yang dihasilkan tahun 1990 oleh 34 negara Annex I UNFCCC	67

DAFTAR SINGKATAN

<i>AGBM</i>	<i>Ad-Hoc Working Group on Berlin Mandate</i>
<i>AOSIS</i>	<i>Alliance of Small Island States</i>
<i>AWG-LCA</i>	<i>Ad hoc Working Groups on Long-term Cooperative Action</i>
<i>BMU</i>	<i>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (German Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety)</i>
<i>BMWi</i>	<i>Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (Federal Ministry for Economics)</i>
<i>BMZ</i>	<i>Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (German Federal Ministry for Cooperation and Development)</i>
<i>CDM</i>	<i>Clean Development Mechanism</i>
<i>CDU</i>	<i>Christian Democratic Union</i>
<i>CNN</i>	<i>Cable News Network</i>
<i>COP</i>	<i>Conference of the Parties (to the FCCC)</i>
<i>COP/MOP</i>	<i>Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol</i>
<i>CSD</i>	<i>Commission on Sustainable Development</i>
<i>CSU</i>	<i>Christian Social Union</i>
<i>EC</i>	<i>European Community</i>
<i>EC</i>	<i>European Community</i>
<i>EITs</i>	<i>Economies In Transition</i>
<i>EU</i>	<i>European Union</i>
<i>FDP</i>	<i>Free Democratic Party</i>
<i>FIELD</i>	<i>Foundation for Internasional Environmental Law and Development</i>
<i>FoE</i>	<i>Friends of the Earth</i>
<i>FRG</i>	<i>Federal Republic of Germany</i>
<i>G-7</i>	<i>Group of Seven</i>
<i>G-77</i>	<i>Group of Seventy Seven</i>

<i>G-8</i>	<i>Group of Eight</i>
<i>GEF</i>	<i>Global Environmental Facility</i>
<i>IGOs</i>	<i>International Governmental Organizations</i>
<i>INC/FCCC</i>	<i>Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change</i>
<i>IPCC</i>	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
<i>JUSSCANNZ</i>	<i>Japan, United States, Switzerland, Canada, Australia, Norway, New Zealand</i>
<i>LULUCF</i>	<i>land use, land-use change and forestry</i>
<i>MITI</i>	<i>Ministry of International Trade and Industry</i>
<i>MNCs</i>	<i>Multinational Corporations</i>
<i>NATO</i>	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
<i>NGO</i>	<i>Non Government Organization</i>
<i>ODA</i>	<i>Official/Overseas Development Assistance</i>
<i>ODS</i>	<i>Ozone-Depleting Substance</i>
<i>OECD</i>	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
<i>OPEC</i>	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
<i>PBB</i>	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
<i>SBI</i>	<i>Subsidiary Body for Implementation</i>
<i>SBSTA</i>	<i>Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i>
<i>SEF</i>	<i>Stiftung Entwicklung und Frieden (Development and Peace Foundation)</i>
<i>SPD</i>	<i>Social Democratic Party</i>
<i>UNCCC</i>	<i>United Nations Conference on Climate Change</i>
<i>UNCED</i>	<i>United Nations Conference on Environment and Development</i>
<i>UNEP</i>	<i>United Nations Environment Program</i>
<i>UNFCCC</i>	<i>United Nations Framework Conference on Climate Change</i>
<i>WMO</i>	<i>World Meteorological Organization</i>
<i>WSSD</i>	<i>World Summit on Sustainable Development</i>